

## Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana Longsor di Wilayah Pesisir Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir

Rafika Farma<sup>1\*</sup>, M. Yusuf<sup>2</sup>, Hapsa<sup>3</sup>, Michael Lega<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Pemerintahan, Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia.

\*Email: [farmarafika28@gmail.com](mailto:farmarafika28@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana longsor di wilayah pesisir Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Wilayah ini memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, terutama tanah longsor akibat abrasi dan curah hujan tinggi pada kondisi tanah rawa yang labil. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan melibatkan informan dari pemerintah kecamatan, BPBD, pemerintah desa, masyarakat, dan pihak swasta. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor telah berjalan namun belum optimal, ditandai oleh lemahnya komunikasi antarinstansi, kurangnya sinkronisasi program, belum jelasnya pembagian tugas, dan rendahnya komitmen bersama. Upaya mitigasi bencana telah dilakukan melalui pendekatan struktural dan non-struktural, namun menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, aksesibilitas wilayah yang sulit, dan rendahnya partisipasi masyarakat.

**Kata Kunci:** koordinasi lintas sektor, mitigasi bencana, wilayah pesisir, tanah longsor, penanggulangan bencana

### Abstract

This study aims to analyze cross-sectoral coordination in disaster management within coastal areas, focusing on Tanah Merah District, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The region is characterized by high vulnerability to hydrometeorological hazards, particularly landslides triggered by coastal abrasion and intense rainfall on unstable peatland. This research employs a qualitative approach using a case study design. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis involving informants from the district government, BPBD, village administrations, local communities, and private sector actors. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model. The findings indicate that cross-sectoral coordination has been established but remains suboptimal, marked by ineffective inter-agency communication, limited program synchronization, unclear role delineation, and insufficient collective commitment. Disaster mitigation efforts have been undertaken through structural and non-structural measures but continue to face constraints including limited financial resources, restricted geographical accessibility, and low community participation.

**Keywords:** cross-sectoral coordination, disaster mitigation, coastal areas, landslides, disaster management

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat kejadian bencana hidrometeorologi yang tinggi. Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) khususnya merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana karena didominasi oleh daerah pesisir, rawa, dan tanah gambut yang labil (Java, 2024). Kecamatan Tanah Merah sebagai bagian dari kabupaten ini memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap bencana longsor akibat abrasi, curah hujan tinggi, dan karakteristik tanah rawa yang mudah jenuh air.

Berdasarkan data BPBD Tembilahan, kejadian longsor di wilayah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 terdapat 43 korban terdampak dan 28 rumah serta 4 fasilitas umum rusak; tahun 2023 sebanyak 47 korban dan 9 rumah serta 3 fasilitas umum rusak; dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 65 korban terdampak dengan 18 rumah dan 3 fasilitas umum terdampak (BPBD Tembilahan, 2024). Tren ini menunjukkan urgensi penanganan yang sistematis dan terkoordinasi.

Penanggulangan bencana di wilayah pesisir tidak dapat dilakukan secara sektoral, melainkan harus melibatkan koordinasi lintas sektor yang terintegrasi (Sarya et al., 2022). Koordinasi lintas sektor mencakup keterlibatan BPBD sebagai koordinator utama, pemerintah kecamatan dan desa sebagai pelaksana lokal, TNI dan Polri dalam aspek keamanan, serta masyarakat dan sektor swasta sebagai elemen pendukung (Soepomo, 2013; Wahyudi & Yuningsih, 2024). Namun dalam praktiknya, koordinasi ini menghadapi berbagai hambatan yang membatasi efektivitasnya.

Kajian tentang koordinasi penanggulangan bencana telah banyak dilakukan pada level provinsi dan nasional, serta pada sektor swasta dan kesehatan. Namun studi yang secara spesifik mengkaji koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana longsor di tingkat kecamatan pada wilayah pesisir dengan karakteristik rawa pesisir masih sangat terbatas (Aulia & Afdal, 2021). Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan fokus pada Kecamatan Tanah Merah sebagai unit pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat terdampak.

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis efektivitas koordinasi lintas sektor antara BPBD dan Pemerintah Kecamatan Tanah Merah dalam penanggulangan bencana; dan (2) mengidentifikasi kendala serta merumuskan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons terhadap bencana di wilayah pesisir.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam proses dan dinamika koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana yang bersifat kontekstual dan spesifik di wilayah pesisir Kecamatan Tanah Merah.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik: (1) wawancara mendalam terhadap 15-21 informan yang mencakup pejabat BPBD Kabupaten Indragiri Hilir, aparatur kecamatan, kepala desa, anggota TNI/Polri, pihak swasta (PT Pulau Sambu), dan masyarakat terdampak; (2) observasi lapangan selama kurang lebih 40 hari bersamaan dengan kegiatan magang di kantor BPBD; dan (3) dokumentasi berupa laporan kegiatan, data kebijakan, dan foto lapangan (Syamsul & Nurjannah, 2022).

Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan keterlibatan langsung dalam penanggulangan bencana. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis difokuskan pada lima indikator koordinasi menurut G.R. Terry, yakni: (1) komunikasi yang efektif; (2) kesatuan tindakan; (3) kerja sama; (4) pembagian tugas yang jelas; dan (5) komitmen bersama; serta dua dimensi mitigasi bencana: struktural dan non-struktural (Zulfa et al., 2022).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Kecamatan Tanah Merah terletak di kawasan pesisir Kabupaten Indragiri Hilir dengan topografi sangat rendah (1-4 meter dpl). Wilayah ini didominasi oleh perairan pesisir dengan jaringan sungai dan muara yang saling terhubung. Desa Tanah Merah memiliki penduduk sekitar 11.668 jiwa dengan luas wilayah 13.693 km<sup>2</sup>. Kondisi ekonomi masyarakat bergantung pada sektor perkebunan kelapa, perikanan, dan perdagangan, namun saat ini menghadapi tekanan berat akibat abrasi dan intrusi air laut yang merusak lahan dan infrastruktur.

Penanggulangan bencana di wilayah ini melibatkan BPBD Kabupaten Indragiri Hilir sebagai leading sector, dibantu pemerintah kecamatan, pemerintah desa, TNI, Polri, dan pihak swasta seperti PT Pulau Sambu melalui program CSR. Salah satu tantangan utama adalah aksesibilitas wilayah yang harus ditempuh menggunakan speedboat selama kurang lebih satu jam dari pusat kabupaten.

**Tabel 1. Laporan Kejadian Bencana Longsor di Kecamatan Tanah Merah (2022-2024)**

| Tahun | Korban Terdampak | Fasilitas Terdampak         |
|-------|------------------|-----------------------------|
| 2022  | 43               | 28 rumah + 4 fasilitas umum |
| 2023  | 47               | 9 rumah + 3 fasilitas umum  |
| 2024  | 65               | 18 rumah + 3 fasilitas umum |

Sumber: BPBD Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

**PEMBAHASAN**

**Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanggulangan Bencana Longsor**

Analisis koordinasi lintas sektor didasarkan pada lima indikator koordinasi menurut G.R. Terry yang dikuatkan oleh kajian Wahyudi dan Yuningsih (2024), Antara et al. (2021), dan Ummah (2019).

a. Komunikasi yang efektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar sektor masih belum optimal. Komunikasi bersifat situasional dan lebih banyak dilakukan melalui media telepon karena kendala geografis. Kepala Desa Tanah Merah menyampaikan: 'Koordinasi dilakukan melalui telepon saja, nanti dari kantor BPBD langsung datang dengan speedboat.' Pola komunikasi yang bersifat reaktif ini menunjukkan belum adanya sistem informasi terpadu, sehingga setiap instansi bekerja berdasarkan informasi internal yang dimiliki. Kondisi geografis pesisir dengan akses terbatas menjadi hambatan signifikan dalam distribusi informasi yang cepat dan merata.

b. Kesatuan tindakan.

Pada tahap mitigasi, kesatuan tindakan belum terwujud secara optimal. Setiap instansi cenderung menjalankan programnya secara sektoral tanpa integrasi yang kuat dengan instansi lain. Sinkronisasi program antarinstansi masih lemah, dengan belum adanya perencanaan terpadu yang mengatur pembagian peran dan sinergi program. Namun pada tahap tanggap darurat, kesatuan tindakan cenderung lebih efektif karena tekanan situasi mendorong respons cepat. Pemerintah kecamatan menyiapkan 15 unit rumah bantuan bagi masyarakat terdampak sebagai wujud nyata kesatuan tindakan, meskipun pelaksanaannya menghadapi kendala keberlanjutan.

c. Kerja sama.

Kerja sama antarsektor telah terjalin, terutama dalam penanganan masyarakat terdampak. Kepala Bidang Logistik BPBD menyatakan: 'Jika terjadi bencana, kami langsung turun ke lokasi

bersama tim TRC serta membawa bantuan logistik seperti uang, pakaian, dan kebutuhan lainnya.' Namun kerja sama ini masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Kolaborasi antarlembaga lebih sering muncul saat terjadi bencana dan belum ada program bersama yang dirancang secara terpadu untuk tahap mitigasi. Keterlibatan masyarakat juga masih pasif, terutama pada tahap perencanaan dan evaluasi.

d. Pembagian tugas yang jelas.

Secara formal, pembagian tugas antar instansi sudah diatur dalam struktur kelembagaan dengan BPBD sebagai koordinator utama. Namun dalam praktiknya, kejelasan peran belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan secara optimal, terutama pada tahap mitigasi. Staf BPBD mengungkapkan bahwa rencana pembangunan DAM penahan longsor belum terealisasi karena keterbatasan anggaran, mencerminkan lemahnya implementasi pembagian tugas pada aspek perencanaan infrastruktur.

e. Komitmen bersama.

Pemerintah di Kecamatan Tanah Merah menunjukkan komitmen dalam penanggulangan bencana, terutama pada saat terjadi bencana. Namun komitmen pada tahap mitigasi masih belum kuat. Program mitigasi belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan. Keterbatasan sumber daya berupa anggaran, SDM (TRC berjumlah hanya 75 orang untuk seluruh kabupaten), dan sarana prasarana yang kurang layak menjadi kendala utama.

### **Mitigasi Bencana dalam Penanggulangan Risiko Bencana**

Upaya mitigasi bencana di Kecamatan Tanah Merah dianalisis melalui dua pendekatan sesuai teori mitigasi Zulfa et al. (2022) serta Yan Prastowo & Setyo Wahyuningsih, (2020).

Upaya Struktural. Pembangunan infrastruktur pengendali bencana di Kecamatan Tanah Merah masih sangat terbatas. Rencana pembangunan DAM di sepanjang pinggiran sungai sebagai upaya pencegahan longsor belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran yang sangat besar. Infrastruktur yang tersedia belum mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap wilayah-wilayah berkerentanan tinggi. Pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada pun belum berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran dan tenaga teknis.

Upaya Non-Struktural. Penguatan kebijakan dan penataan ruang di Kecamatan Tanah Merah belum berjalan secara optimal. Belum terdapat regulasi spesifik di tingkat lokal (Perdes) yang secara khusus mengatur mitigasi bencana longsor. Kebijakan yang ada masih bersifat umum dan belum berbasis risiko (risk-based planning). Masih terdapat pemukiman masyarakat di wilayah rawan longsor yang belum diatur secara tegas melalui kebijakan tata ruang yang implementatif.

Edukasi dan peningkatan kapasitas masyarakat masih dilakukan secara terbatas dan tidak terjadwal rutin. Sosialisasi bersifat insidental, hanya muncul ketika ada program dari pemerintah daerah atau setelah terjadi bencana. Seorang warga masyarakat (Ibu Masdiah) menyatakan: 'Kami lebih banyak belajar dari kejadian yang sudah-sudah.' Kondisi ini menunjukkan pendekatan yang masih reaktif, bukan preventif. Sistem peringatan dini juga masih sangat sederhana dan belum terintegrasi teknologi, sehingga masyarakat lebih mengandalkan pengalaman pribadi dalam mengenali tanda-tanda bencana.

Partisipasi masyarakat masih berada pada level pasif dan bersifat situasional. Kepala Desa mengakui: 'Belum ada forum khusus yang rutin membahas soal bencana.' Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan Community-Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) belum diterapkan secara sistematis. Temuan ini sejalan dengan studi Nurcahyo et al. (2022) yang menekankan pentingnya manajemen pengurangan risiko berbasis komunitas.

### **SIMPULAN**

Koordinasi lintas sektor dalam penanggulangan bencana longsor di wilayah pesisir Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir masih belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari lemahnya komunikasi antarinstansi yang bersifat reaktif dan situasional, kurangnya sinkronisasi program, belum jelasnya implementasi pembagian tugas pada tahap mitigasi, serta komitmen bersama yang lebih kuat pada saat tanggap darurat dibandingkan pada tahap perencanaan dan mitigasi.

Upaya mitigasi bencana menghadapi kendala serius baik pada aspek struktural maupun non-struktural. Pembangunan infrastruktur penahan longsor belum terealisasi akibat keterbatasan anggaran. Edukasi masyarakat masih sporadis dan belum berbasis komunitas, sistem peringatan dini masih sederhana, serta partisipasi masyarakat masih pasif. Kondisi geografis pesisir yang sulit dijangkau semakin memperparah hambatan-hambatan tersebut.

Efektivitas penanggulangan bencana di Kecamatan Tanah Merah sangat bergantung pada penguatan koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur, integrasi mitigasi dalam perencanaan pembangunan, dan penguatan peran masyarakat sebagai aktor utama. Diperlukan transformasi dari pendekatan reaktif menuju sistem penanggulangan bencana yang terintegrasi, partisipatif, dan berbasis pada kapasitas lokal masyarakat.

## SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan: (1) Pemerintah kecamatan dan BPBD membangun mekanisme komunikasi terpadu dan forum koordinasi rutin yang berkelanjutan; (2) Program mitigasi bencana diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMDes dan RKPDes) sebagai bagian dari kebijakan strategis jangka panjang; (3) Frekuensi dan kualitas edukasi kebencanaan ditingkatkan melalui pendekatan partisipatif dan simulasi berkala; (4) Sistem peringatan dini dikembangkan dengan teknologi yang lebih memadai dan terintegrasi; (5) Partisipasi aktif masyarakat difasilitasi melalui pembentukan forum kebencanaan tingkat desa yang bersifat rutin; (6) Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah pesisir untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara, K., Purba, D., & Fauzan, K. (2021). Koordinasi pemerintah dalam pembangunan daerah. *Jurnal Governance*, 1(1), 1–9.
- Aulia, P., & Afdal, A. (2021). Analisis suseptibilitas magnetik tanah permukaan sebagai indikator longsor di Bukit Karan Padang. *Jurnal Fisika Unand*, 9(4), 472–478.
- Ditha Prasanti, & Fuady, I. (2022). Penggunaan media komunikasi bagi masyarakat dalam mitigasi bencana longsor di Desa Cimanggu. Dalam *Seminar Nasional Magister Communication*.
- Hamida, F. N., & Widyasamratri, H. (2019). Risiko kawasan longsor dalam upaya mitigasi bencana menggunakan sistem informasi geografis. *Pondasi*, 24(1), 67–76.
- Java, E. (2024). Analisis tingkat risiko bencana tanah longsor di wilayah Kabupaten Blitar, Jawa Timur. *Region*, 19(1). <https://doi.org/10.20961/region.v19i1.58889>
- Nurchahyo, M., Setyawan, A., & Ansori, T. (2022). Manajemen pengurangan resiko bencana berbasis komunitas. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 4(2), 91–104.
- Sarya, G., Pramesti, T., Arrowrichta, B., & Watu, H. B. (2020). Antisipasi menghadapi bencana tanah longsor di Desa Snepo Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. *SHARE*, 6(2), 105–109.
- Soepomo, P. (2013). Pemanfaatan Google Maps API untuk pembangunan pasca bencana alam berbasis mobile web. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi* (hlm. 162–171).
- Syamsul, R. J., & Nurjannah, S. (2022). Peran pemerintah dalam mengatasi erosi tanah yang berdampak bencana alam tanah longsor. *Alauddin Law Development Journal*, 4(2), 393–401.
- Ummah, M. S. (2019). Koordinasi sebagai faktor penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 1–14.

- Wahyudi, B., & Yuningsih, N. Y. (2024). Koordinasi pemerintahan dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Cimahi. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 6(4), 845–858.
- Yan Prastowo, L., & Setyo Wahyuningsih, A. (2020). Kajian mitigasi bencana tanah longsor berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2006. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 1(33), 60–71.
- Zulfa, V. A., Widyasamratri, H., & Kautsary, J. (2022). Mitigasi bencana berdasarkan tingkat risiko bencana tanah longsor. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 154–166. <https://doi.org/10.30659/jkr.v2i2.26532>